

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang perempuan dan gender, sudah menjadi tanggung jawab UN Women untuk menangani kasus *domestic violence* yang mengalami lonjakan. Dalam menangani kasus *domestic violence* terhadap perempuan di India pada masa pandemi COVID-19, UN Women menjalankan perannya sebagai instrumen, arena, dan aktor independen berdasarkan teori organisasi Clive Archer. Sebagai instrumen, UN Women menjadi alat untuk mendukung operasional program-program yang sudah berlangsung, seperti *One-Stop Centre* (OSC), *Women HelpLine* (WHL), dan *Jugnu Clubs*. Tidak hanya program yang sudah berlangsung, UN Women ikut serta dalam kolaborasi pembuatan program baru, yakni aplikasi *MyAmbar* bersama *Vodafone Idea Foundation*, *NASSCOM Foundation*, dan *Sayfty Trust*; juga *SAMBAL* bersama *DolphinChat*. UN Women juga menjadi instrumen untuk memberi bantuan dana melalui *Multi-Partner Trust Fund* (MPTF) bersama UNICEF, WHO, dan UNHCR, serta kolaborasi dengan *SEWA Bharat*. Selain itu, UN Women menjadi instrumen untuk menjangkau khalayak yang lebih luas melalui kolaborasi dengan Google, Facebook, dan Twitter serta *campaign* seperti *#16Days* dan *#HeForShe* yang menyebarkan *awareness* terkait *domestic violence* dan kekerasan berbasis gender lainnya melalui media sosial.

Sebagai arena, UN Women UN Women menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar Tingkat Menteri secara virtual, dengan tema “Towards Gender-Responsive CoVID-19 Recovery: experiences from Asia and the Pacific” pada tanggal 9 Juni 2020. Sesuai dengan tema, para menteri yang hadir membahas perlunya dimensi gender dalam respons COVID-19. UN Women juga membentuk *Generation Equality Forum* (GEF) yang diselenggarakan pada tahun 2021. GEF menjadi forum diskusi untuk mendiskusikan aksi konkret yang dapat dilakukan untuk mempercepat kesetaraan gender, di dalamnya termasuk membahas respons

atas krisis berbasis gender pasca pandemi COVID-19. Forum diskusi ini menghasilkan serangkaian Koalisi Aksi yang dimuat dalam *Global Acceleration Plan* (GAP). Terakhir, sebagai aktor independen, UN Women memberi imbauan kepada pemerintah India, menginisiasi bantuan dan pembentukan program baru yang sebenarnya dibutuhkan negara tanpa diminta oleh pemerintah negaranya sendiri. Setelah ditinjau, peran yang mendominasi adalah kolaborasi antara aktor independen dan instrumen, di mana UN Women kerap kali menginisiasi program-program yang menjadi alat untuk membantu penanganan kasus *domestic violence* terhadap perempuan di India. Tidak hanya kepada pihak eksternal, UN Women juga turut berperan dalam pihak internal, yakni mentransformasi institusi pemerintahan India menjadi lebih gender inklusif.

Dalam penanganan kasus *domestic violence* terhadap perempuan di India pada masa pandemi COVID-19, upaya UN Women tidak sepenuhnya berjalan mulus. Hal-hal yang bersumber dari pihak internal maupun eksternal, seperti institusi pemerintahan yang patriarkis dan masih belum mewujudkan kebijakan responsif gender secara maksimal serta program-program yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi masyarakat sipil menjadi tantangan yang menghambat upaya UN Women sehingga dinilai masih belum berhasil. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus *domestic violence* yang malah meningkat pasca 2021, padahal situasi telah kembali normal.

*Domestic violence* atau yang biasa disebut “intimate partner violence” adalah salah satu jenis kekerasan berbasis gender yang terjadi kepada perempuan oleh pasangannya. Di antara negara-negara di dunia, India merupakan salah satu negara yang memiliki angka kasus *domestic violence* tertinggi. Berdasarkan data Demographic Health Surveys terkait *domestic violence*, satu dari tiga perempuan peserta survei di India pernah menjadi korban *domestic violence*. Langgengnya tindakan *domestic violence* di masyarakat India ini didorong oleh berbagai hal, seperti: ideologi patriarki yang masih melekat, hukum dan budaya yang belum benar-benar memihak pada perempuan, dan karakteristik pelaku serta lingkungan tempat korban tinggal. Terlebih pada tahun 2020 hingga 2021 di mana terjadi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penerapan kebijakan *lockdown*. Kebijakan ini cukup efektif untuk menekan angka COVID-19, tetapi terdapat efek

sampingnya, yaitu pelonjakan kasus *domestic violence* secara signifikan. Fenomena ini UN Women deklarasikan sebagai *The Shadow Pandemic*.

Dalam menangani kasus *domestic violence*, pemerintah mengupayakan berbagai hal, mulai dari hukum, institusi, hingga program. India memiliki hukum untuk menangani *domestic violence*, yaitu India Penal Code pasal 498-A dan Protection of Women from Domestic Violence (PWDVA). Tidak hanya hukum, India juga memiliki institusi yang khusus untuk menangani isu perempuan, yakni National Commission for Women (NCW). Selain hukum dan institusi, India juga memiliki program-program penanganan *domestic violence* dan kekerasan berbasis gender lainnya yang dinaungi oleh Kementerian Perempuan dan Anak India (MWCD). MWCD memiliki gender *budget* yang dinamakan Nirbhaya Fund, yang mana dana ini digunakan untuk membiayai program-program khusus isu perempuan, seperti *One-Stop Centre* (OSC) dan *Women Helpline* (WHL).

Pada tahun 2020-2021 di mana wabah COVID-19 merebak, terjadi fenomena *shadow pandemic*, tetapi pemerintah India tidak membentuk inisiasi khusus untuk isu *domestic violence* bahkan tidak mendeklarasikan isu ini sebagai isu yang esensial secara nasional. Pemerintah hanya melanjutkan operasi program-program yang sudah berjalan, dan menyediakan beberapa saluran telepon bantuan baru. Meskipun tidak ada inisiatif dari pemerintah secara nasional, sebagian pemerintah negara bagian menerapkan program-program khusus menangani kasus *domestic violence* di tengah pandemi COVID-19, seperti saluran bantuan khusus di Uttar Pradesh dan *Pink Booth* di Delhi.

## 6.2 Saran

Sebagai negara yang dikenal dengan jumlah kasus *domestic violence* yang begitu tinggi, pemerintah India sebaiknya lebih memperhatikan bahkan memprioritaskan isu ini ketika membuat suatu kebijakan. Pemerintah harus ingat akan komitmennya untuk mengeliminasi kekerasan berbasis gender. Maka dari itu, pemerintah juga diharapkan dapat mengimprovisasi pengimplementasian program

yang sudah ada, atau membuat program baru yang dapat mencegah dan menangani kasus *domestic violence* di India dengan lebih efektif.

Sebagai organisasi internasional, UN Women seharusnya lebih bisa memanfaatkan *power*-nya untuk memperingati India agar lebih memprioritaskan isu gender. Program-program untuk mengeliminasi kekerasan terhadap perempuan juga perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya, juga dimonitor pengimplementasiannya dengan lebih baik lagi. Selain itu, UN Women diharapkan dapat menginduksi dan mempublikasikan lebih banyak laporan hasil program-program yang telah dijalani, karena cukup sulit mencari informasi terkait hasil dan kendala yang dialami pada saat penyelenggaraan program.

Untuk para akademisi yang hendak melakukan penelitian seputar peran organisasi internasional, *domestic violence*, isu gender di India, diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi inspirasi. Jika hendak meneliti topik yang sejenis, peneliti menyarankan untuk menggunakan metode penelitian dan/atau teori penelitian yang lain agar dapat menemukan hasil yang berbeda. Peneliti juga menyarankan untuk membuat penelitian dalam periode setelah periode di penelitian ini, sehingga dapat dilihat bagaimana situasi dan penanganannya setelah situasi kembali normal, terlepas dari pandemi COVID-19.